

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya terletak pada lingkup kecil atau juga mikro (Abid, 2021). (Rizky, 2008) menyatakan bahwa UMKM memiliki keunikan dibanding usaha formal pada umumnya, di mana UMKM merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Selain itu, jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti ganti, lokasi usaha dari UMKM terkadang tidak menetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha. Kendati demikian, UMKM justru memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut memberikan peluang karena eksistensi UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan, dengan banyaknya jumlah UMKM yang berbanding lurus terhadap penyerapan tenaga kerja memungkinkan kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional sangat dominan.

Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting yaitu Pertama, UMKM sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Banyaknya UMKM yang tersebar di Indonesia dan penyerapan tenaga kerja lokal mampu menjadikan UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Kedua, UMKM sebagai penyedia lapangan kerja. Semakin banyak jumlah UMKM yang berkembang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaan usaha, hal tersebut akan berbanding lurus terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di mana peran UMKM di sini mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan mampu menjadi jembatan untuk meratakan perekonomian di Masyarakat Kecil. Ketiga, UMKM dapat menciptakan persaingan pasar yang lebih inovatif. Hal yang menjadi keunikan tersendiri dari produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah adanya unsur budaya dan kearifan lokal. Dengan banyaknya variasi produk yang dikombinasikan dengan budaya dari masing-masing daerah, hal tersebut akan melahirkan persaingan pasar yang lebih kreatif dan inovatif. Seluruh peran yang telah diuraikan memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran Nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran yang amat penting.

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 38 Provinsi yang memiliki potensi tinggi dalam menyumbang pendapatan nasional dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Provinsi Bali memiliki peran penting dalam menumbuhkan pariwisata dan usaha-usaha kecil seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali (Sunatianti, dkk 2017). Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Bali membuat kontribusi Pendapatan Nasional Provinsi Bali sangat besar. Selain itu, dengan banyaknya jumlah sektor UMKM di Bali akan berbanding lurus terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang mampu menjadi solusi dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bali dan menyetarakan pendapatan masyarakat kecil, sehingga keberadaan UMKM di Provinsi Bali hendaknya terus diperhatikan dan diberdayakan.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jembrana	10.526	27.654	24.346	46.277	66.537
2	Tabanan	38.980	41.459	42.744	43.715	47.150
3	Badung	17.754	19.688	19.261	22.647	40.989
4	Gianyar	91.511	75.412	75.428	75.542	75.620
5	Klungkung	9.712	11.761	14.584	35.792	36.072
6	Buleleng	51.563	34.552	34.374	54.489	57.216
7	Bangli	43.948	44.008	44.068	44.123	44.693
8	Karangasem	38.954	39.551	40.468	57.456	40.614
9	Denpasar	30.840	31.826	32.626	32.224	32.226
Jumlah		333.788	325.911	327.899	412.265	441.117

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa keberadaan UMKM tersebar ke seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yaitu 9 Kabupaten/Kota. Jumlah dari UMKM di Provinsi Bali selama periode 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan di mana pada tahun 2017 jumlah UMKM di Provinsi Bali adalah 333.786 dan menjadi 441.117 pada tahun 2021. Kabupaten Gianyar merupakan Kabupaten yang memiliki unit UMKM terbanyak yaitu 75.620 unit di tahun 2021, namun jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dilihat pada tahun 2017 yang

berjumlah 91.511. Peningkatan unit UMKM di Provinsi Bali yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2021 menjadi bukti nyata bahwa masyarakat di Provinsi Bali sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sekalipun sempat mengalami masa krisis di tahun 2019, di mana wabah Covid-19 menimbulkan banyak masalah pada sektor ekonomi.

Pada akhir tahun 2019, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya wabah *coronavirus disease 2019* (Covid-19). Covid-19 merupakan virus yang mengakibatkan masalah besar bagi seluruh Negara termasuk di Indonesia. (Wordometer, 2020) menyatakan bahwa hingga tanggal 30 Mei 2020, pasien yang terinfeksi virus Covid-19 di seluruh Negara mencapai 6 juta manusia dengan angka kematian mencapai 282 jiwa. Dinilai wabah Covid-19 sangat berbahaya, beberapa negara menerapkan regulasi berupa pembatasan aktivitas manusia di luar rumah termasuk di Indonesia. Pembatasan tersebut mengakibatkan banyak sektor yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sektor yang sangat terdampak akibat wabah Covid-19 adalah sektor ekonomi.

Regulasi berupa pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatkan Pendapatan Nasional merosot. Banyak sektor ekonomi yang tidak mampu beroperasi sebagai mana mestinya mengakibatkan volume Perdagangan Nasional menurun bahkan para pekerja yang merupakan pelaku dari kegiatan ekonomi turut merasakan imbasnya berupa Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). Hal itu mengakibatkan penurunan perekonomian negara yang signifikan. Dikutip dari Website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM di Indonesia. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. (Menurut Susilawati, 2020) sektor yang terkena dampak wabah Covid-19 adalah sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor rumah tangga. Provinsi Bali sebagai Provinsi yang mengandalkan sektor Pariwisata dan Perdagangan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, sangat terdampak akibat wabah Covid-19.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyebutkan bahwa Ekonomi Provinsi Bali dalam periode Triwulan I tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif yaitu -

1,14% apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi periode Triwulan I tahun 2019. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan maraknya wabah Covid-19 yang mempengaruhi pergerakan masyarakat secara individu ataupun secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Data pada tahun 2019 menunjukkan, sektor pariwisata berkontribusi 78% terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Angka yang sangat jauh apabila dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor pertanian yang hanya menyumbang 14,5%. Uniknya, kesenjangan dari sektor pariwisata di Bali tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor perdagangan di Provinsi Bali. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah unit UMKM di Provinsi Bali. Dilihat dari Tabel 1.1, salah satu Kabupaten yang paling stabil dalam menghasilkan unit UMKM baru adalah Kabupaten Jembrana.

Kabupaten Jembrana merupakan Kabupaten yang mengalami peningkatan paling signifikan pada jumlah UMKM pada saat wabah Covid-19 merebak. Di mana pada tahun 2017, UMKM yang tersebar di Kabupaten Jembrana adalah 10.526 unit, pada tahun 2018 menjadi 27.654 unit, pada tahun 2019 menjadi 24.346 unit, pada tahun 2020 menjadi 46.277, dan pada tahun 2021 menjadi 66.537 unit UMKM. Data statistik tersebut menunjukkan peningkatan signifikan, yang menjelaskan bahwa eksistensi masyarakat di Kabupaten Jembrana terhadap usaha tidak terpatalkan, sekalipun terdampak wabah Covid-19. Seperti yang sudah diuraikan di atas mengenai peran UMKM terhadap perekonomian, peningkatan tersebut dapat membantu Kabupaten Jembrana dalam membantu pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh wabah Covid-19. Namun, perkembangan tersebut tentunya harus didukung dengan dilakukannya beberapa pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari UMKM itu sendiri.

Usaha mikro kecil dan menengah berkualitas merupakan UMKM yang telah mengikuti pelatihan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. UMKM berkualitas memiliki beberapa ciri yaitu mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu proses produksi ataupun alat bantu pencatatan transaksi keuangan usaha, memiliki sistem pemasaran online, memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi, memiliki pelayanan usaha yang bagus dan memberikan respon yang cepat terhadap perubahan pasar ataupun konsumen (Yani, 2021). Menurut (Novianti, 2018) 4 indikator yang dapat digunakan dalam menilai

kinerja UMKM adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan laba.

Tabel 1.2
Indikator dan Capaian Kerja UMKM di Provinsi Bali

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kabupaten/Kota	Capaian (%)		
			2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase UMKM yang berkualitas	Jembrana	3%	13,3%	13,57%
		Tabanan	16,21%	16,49%	18,19%
		Badung	27,46%	27,12%	39,41%
		Gianyar	20,23%	21,12%	21,49%
		Klungkung	23,58%	25,47%	28,30%
		Buleleng	16,27%	14,86%	15,25%
		Bangli	12,11%	12,34%	12,51%
		Karangasem	15,43%	16,76%	16,29%
Denpasar	10,92%	16,43%	21,94%		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar 2022

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa peningkatan kualitas UMKM terendah terdapat di Kabupaten Bangli yaitu dengan persentase sebesar 12,51% pada tahun 2021. Namun apabila melihat dari jumlah unit UMKM yang ada di Kabupaten Bangli, peningkatan tersebut dapat dikatakan stabil. Hal tersebut dikarenakan peningkatan dan penurunan unit UMKM di Kabupaten Bangli hanya berkisar di angka ratusan unit UMKM. Kemudian, peningkatan kualitas UMKM terendah selanjutnya terdapat di Kabupaten Jembrana yaitu dengan persentase sebesar 13,57% pada tahun 2021. Apabila melihat dari persentase angka, terlihat memang terjadi peningkatan persentase yang signifikan terhadap jumlah UMKM yang berkualitas di Kabupaten Jembrana dari 3% pada tahun 2019 menjadi 13,57% pada tahun 2021. Namun, mengingat pada tahun 2021 jumlah unit UMKM di Kabupaten Jembrana juga mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dari tahun 2019, angka 13,57% pada tahun 2021 justru menjelaskan bahwa UMKM yang berkualitas masih belum merata.

Tabel 1.3
Jumlah UMKM Berkualitas di Kabupaten Jembrana

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Persentase UMKM berkualitas	3%	13,3%	13,57%
Jumlah UMKM	24.346	46.277	66.537
Jumlah UMKM berkualitas	730 Unit	6.279 Unit	9.029 Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Jembrana (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa unit UMKM yang berkualitas di Kabupaten Jembrana berjumlah 730 Unit di tahun 2019, menjadi 6.279 unit di tahun 2020 dan menjadi 9.029 unit di tahun 2021. Secara angka, terlihat bahwa di tahun 2021 jumlah UMKM yang berkualitas memang bertambah namun jumlah UMKM yang tidak berkualitas di Kabupaten Jembrana juga bertambah menjadi 57.508 unit. Hal ini menjelaskan bahwa perkembangan unit UMKM di Kabupaten Jembrana belum dibarengi dengan pemberdayaan serta pengelolaan yang memadai oleh pelaku UMKM. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana Tahun 2022, disebutkan bahwa pada tahun 2021, UMKM yang berdomisili di Kabupaten Jembrana memiliki beberapa hambatan dalam melangsungkan kegiatan usahanya seperti yang pertama, Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berupa keahlian / keterampilan, kewirausahaan dan manajemennya sebagai pelaku UMKM. Kedua, akibat banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Jembrana mengakibatkan tingkat persaingan pasar yang semakin ketat. Ketiga, terbatasnya akses dari pelaku UMKM kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, informasi pasar dan teknologi.

Menyikapi hambatan tersebut, solusi yang diberikan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Jembrana yang tertulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana Tahun 2022 yaitu yang pertama adalah mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perbankan melalui fasilitas pemberian modal (kredit) di samping pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM secara rutin dan berkelanjutan. Kedua, Meningkatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga mampu meningkatkan volume usaha dan pelayanan melalui koordinasi lintas

sektoral. Ketiga, Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang kelembagaan, usaha serta semangat *interpreneurship* kepada pelaku UMKM. Dan keempat, melakukan pembinaan untuk meningkatkan Bimtek kepada pelaku UMKM.

Dari masalah serta solusi yang diberikan pemerintah, peneliti mendatangi dua pelaku UMKM yang berdomisili di Kabupaten Jembrana guna mengetahui keadaan UMKM yang sebenarnya. Adapun data yang peneliti dapatkan yaitu berupa masalah umum dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Jembrana adalah Masalah Akuntabilitas, di mana pelaku UMKM belum memiliki sistem administrasi keuangan yang memadai dan hanya mengandalkan proses pencatatan keuangan yang sederhana yaitu berupa nota sebagai arsip pembelian. Karena dianggap usahanya tidak mencakup lingkup yang besar, tidak jarang pelaku UMKM di Kabupaten Jembrana menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan yang tidak begitu penting dalam mengelola usahanya sehingga memilih menggunakan nota saja sebagai arsip keuangan. Menurut (Sinarwati, 2014) dalam (Rukmini, 2015), apabila tidak adanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM, maka besar kemungkinan tidak akan ada perkembangan yang signifikan dalam usahanya. Apabila tidak ada informasi akuntansi yang jelas, maka para pelaku UMKM tidak dapat mengukur kinerja keuangan usaha dan pelaku UMKM akan kesulitan dalam melakukan perencanaan serta penganggaran yang baik untuk kegiatan usahanya.

Salah satu hal yang mendasari Kinerja Keuangan UMKM adalah mengenai bagaimana suatu pelaku usaha mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya baik itu asset fisik atau asset yang tidak berwujud. Apabila suatu perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memperoleh, mengelola dan mempertahankan sumber daya yang dimiliki, maka perusahaan tersebut akan memiliki suatu keunggulan kompetitif dan mampu memiliki daya saing terhadap para kompetitornya yang akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan (Prasetya & Mutmainah, 2017).

Dalam rangka mendorong akses pembiayaan UMKM yang lebih luas dan menguatkan literasi Keuangan UMKM, Bank Indonesia (BI) Bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiAPIK) berbasis

Android pada tahun 2019. SiAPIK merupakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis *Android* yang diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan usaha sehingga dapat menjadi solusi akses keuangan UMKM untuk naik kelas (Bank Indonesia, 2015). Dengan menggunakan Aplikasi SiAPIK, pelaku UMKM dapat mencatat dan menghasilkan laporan keuangan usaha secara jelas dan sederhana hanya dengan menggunakan *smartphone*. Standar Pencatatan keuangan yang diadopsi Aplikasi SiAPIK mengacu pada standar yang telah disusun oleh Bank Indonesia (BI) Bersama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Sistem pencatatan yang diadopsi aplikasi SiAPIK yaitu sistem *Single Entry* (Menurut Transaksinya) untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam memasukkan data keuangan usaha. Sistem tersebut akan mempermudah pelaku UMKM dalam mengoperasikan Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Informasi Keuangan (SiAPIK), karena pelaku UMKM tidak perlu untuk mengklasifikasikan antara transaksi debit atau kredit (Seperti pada sistem *Double Entry*). Kemudahan yang ditawarkan oleh Aplikasi SiAPIK akan mempermudah pelaku UMKM untuk cepat beradaptasi serta memahami dari cara penggunaan Aplikasi SiAPIK. Pelaku UMKM cukup mengategorikan sebuah transaksi, apakah transaksi yang hendak di input tersebut merupakan penerimaan ataupun pengeluaran. Untuk menunjang pemahaman lebih lanjut oleh Pelaku UMKM, Aplikasi SiAPIK juga dilengkapi dengan fitur “Buku Pedoman Literasi SiAPIK” sebagai modul pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang ter standarisasi serta memenuhi kebutuhan Lembaga keuangan dalam melakukan analisa kredit.

Dengan diterbitkan Aplikasi SiAPIK untuk UMKM, diharapkan pelaku UMKM mampu dalam melakukan pencatatan serta menghasilkan laporan keuangan yang sederhana namun informatif. Laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan UMKM dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dimasa mendatang. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Kabupaten yang sudah mulai untuk memberikan pendampingan berupa pelatihan Bimtek kepada pelaku UMKM, dengan memberikan literasi berupa penggunaan Aplikasi SiAPIK untuk melakukan pencatatan keuangannya. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Jembrana untuk menerapkan digitalisasi UMKM di

Kabupaten Jembrana. Selain itu, dengan Laporan keuangan yang dihasilkan, pelaku UMKM juga dapat menjangkau akses permodalan yang lebih luas baik dari pihak Bank, kreditur atau mitra usaha lainnya.

Jumlah UMKM yang semakin banyak tentu akan menjadi tantangan tersendiri oleh pelaku UMKM dalam menciptakan kreativitas serta ide-ide baru agar produk yang dihasilkan memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan kompetitor. Manusia sebagai aset yang paling dominan akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sumber Daya Manusia merupakan unsur penggerak utama dalam menciptakan inovasi, menentukan strategi dalam mencapai tujuan serta mengembangkan kegiatan usaha. Sehingga, Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibutuhkan untuk menciptakan kinerja UMKM yang baik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya dalam melangsungkan suatu usaha. Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena keberlangsungan suatu unit usaha ditentukan oleh bagaimana suatu individu yang terlibat dalam kegiatan usaha, mengelola usaha tersebut (Wahyudiati & Isroah, 2018). Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dapat dikategorikan dalam 5 kategori yaitu pertama, bagaimana seseorang mampu mempengaruhi, mengelola dan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Kedua, bagaimana seseorang mampu menjalin hubungan yang baik antara orang lain sesama perangkat usaha. Ketiga, bagaimana pembawaan individu seseorang dalam melangsungkan kegiatan usaha seperti integritas serta kejujuran yang dimiliki seseorang. Keempat, bagaimana seseorang dapat memajemen hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan pengembangan seorang individu. Dan kelima, bagaimana kemampuan seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau usaha dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sumber Daya Manusia yang berkompetensi akan mampu dalam melakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya yang ada.

Keuangan dalam menjalankan suatu usaha merupakan pondasi bagi terbangunnya suatu usaha. Keuangan merupakan hal yang bersifat sensitif bagi

suatu usaha, karena apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk dan tentunya akan berpengaruh langsung terhadap jalannya suatu usaha. Dalam suatu usaha diperlukan adanya bidang khusus yang mengurus bagian keuangan. Menurut (Sutrisno, 2003) Pada penelitian (Ritaningsih, 2017: 43) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pengalokasian dana investasi ataupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan usaha secara efisien. Pengelolaan keuangan usaha harus direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pengelolaan keuangan merupakan faktor internal yang akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan suatu usaha.

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pendanaan hingga pengendalian keuangan yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha UMKM. Dengan diterapkannya pengelolaan keuangan, UMKM dapat menganalisis kondisi kinerja keuangan usahanya, dapat membedakan laba bersih dan modal usaha, mengalokasikan dana dengan tepat, mengetahui kewajiban pajak dan mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha UMKM sehingga tercapainya suatu tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam menjalankan usaha terkait dengan pengelolaan keuangan. Hingga sampai saat ini, banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa menerapkan ilmu akuntansi dalam mengelola keuangan usahanya, yang mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan usaha.

Menurut (Andriani et al., 2014) menyatakan bahwa rendahnya praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia disebabkan karena latar belakang Pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi, kurang disiplin dan rajinnya dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. (Risnainingsih, 2017) menambahkan bahwa sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukar dan ukurnya, maka ilmu akuntansi sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Teori tersebut dibuktikan langsung oleh penelitian yang dilakukan oleh (J. Wardi dkk., 2020) yang menyatakan bahwa masih banyak UMKM yang tidak menerapkan pengelolaan

keuangan sesuai dengan kaidah manajemen keuangan seperti penggunaan anggaran, pencatatan hingga pengendalian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana dengan menggunakan variabel yang sesuai dengan hambatan yang disebutkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana Tahun 2022, yaitu Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan (Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Informasi Keuangan, SIAPIK), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan. Hal lain yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu melihat dari perkembangan unit UMKM pada Kabupaten Jembrana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di mana dengan perkembangan jumlah unit UMKM yang tersebar pada Kabupaten Jembrana serta menganalisis hambatan yang dialami UMKM pada Kabupaten Jembrana, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan dari UMKM itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor Aplikasi Akuntansi berbasis *Android* SIAPIK terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan 4 indikator yaitu Keandalan, Konsistensi Kualitas Laporan Keuangan, Kemudahan Penggunaan dan Keakuratan informasi keuangan. Aplikasi Akuntansi berbasis *Android* SIAPIK dapat memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan yang sederhana, mudah, dan cepat. Laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan UMKM yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau memenuhi syarat dalam pencarian modal usaha (Alvian, 2019)

Di samping itu, untuk mengetahui faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja keuangan digunakan 4 indikator yaitu Pengetahuan Individu, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini dikarenakan suatu unit usaha ditentukan oleh bagaimana individu-individu yang terlibat di dalamnya mengelola usaha tersebut (Wahyudiati & Isroah, 2018).

Penelitian ini juga menambahkan faktor Pengelolaan Keuangan sebagai kebaruan variabel. Pengelolaan Keuangan yang baik dilakukan oleh pelaku UMKM akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usahanya, di mana pelaku UMKM akan dapat menganalisis kondisi kinerja keuangan usahanya, dapat membedakan laba bersih dan modal usaha, mengalokasikan dana dengan tepat, mengetahui kewajiban pajak dan mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Untuk mengetahui faktor Pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Keuangan digunakan 4 indikator yaitu Sumber Dana Usaha, Laporan Keuangan, Manajemen Kas dan Penganggaran (Putri, 2020).

Selain itu, terdapat inkonsistensi dari hasil riset terdahulu terkait aplikasi pencatatan akuntansi (Aplikasi Akuntansi berbasis *Android* SIAPIK), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan dalam mengukur kinerja keuangan UMKM yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Mengingat ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti telah mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jemberana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS ANDROID SIAPIK, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN JEMBERANA)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antara jumlah peningkatan UMKM di Kabupaten Jemberana dengan Jumlah UMKM yang berkualitas.
2. Sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Jemberana memiliki permasalahan dalam pengelolaan keuangan terkait penyusunan laporan keuangan.

3. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Jembrana terbilang masih minim dalam mengelola UMKM.
4. Terbatasnya akses pelaku UMKM di Kabupaten Jembrana terhadap Sumber daya produktif seperti permodalan, promosi, serta sarana prasarana, informasi pasar dan teknologi.
5. Adanya inkonsistensi serta minimnya hasil penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel yang sama dengan penelitian ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan yang hanya membahas mengenai Kinerja Keuangan pada UMKM yang berlokasi di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah hanya pada variabel Aplikasi Akuntansi Berbasis *Android* (SiAPIK), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apa pengaruh Aplikasi Akuntansi berbasis *Android* (SIAPIK) terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana?
2. Apa pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana?
3. Apa pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Aplikasi Akuntansi Berbasis *Android* (SiAPIK) terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana.

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

- 1) Manfaat Teoritis
 1. Diharapkan dapat memberikan bantuan pengetahuan mengenai komponen yang mempengaruhi Kinerja Keuangan UMKM, sehingga dapat tercipta UMKM yang berkualitas dan mampu bersaing.
 2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan usaha dalam mewujudkan UMKM yang berkualitas.
 3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya terutama yang membahas mengenai Kinerja Keuangan UMKM.

- 2) Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Aplikasi Akuntansi Berbasis *Android* (SiAPIK), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM.

- b. Bagi Dinas Koperasi dan Perdagangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan mengenai bahan evaluasi dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jembrana sehingga dapat meningkatkan kualitas UMKM dan meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Jembrana.

c. Bagi UMKM

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membantu para pelaku UMKM dalam mengukur kinerja keuangan usahanya sehingga para pelaku UMKM dapat menciptakan UMKM yang lebih berkualitas dan mampu bersaing.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi dan dijadikan sebagai acuan, khususnya mengenai Kinerja Keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan skripsi.

